

# **RESPONS AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEMUNCULAN WIKILEAKS SEBAGAI PEMBOCOR RAHASIA**

**Fiona Fidela Praba Rukmani**

**20120510435**

**fiona.fidela.2012@fisipol.umy.ac.id**

## **Abstract**

*The mass document publications on WikiLeaks involve imperative questions regarding cyber crime and foreign threat. This paper is concerned to discuss the cyber-security implications since WikiLeaks' crucial releases only highlighted the well-known case of government espionage, raising larger questions about the aforementioned issues. From this point forward the Government's response to the various releases can provide a blueprint, but is also a starting point for reviewing their own flaws in the law and orders. In general, the response of the government was framed into (1) a few words by the United States concerning the cyber-security and (2) the confabulation of the releases' overall impact by WikiLeaks, and will conclusively be closed with a detailed analysis towards (3) the conditions of the government's response that have occurred explicitly due to the threat.*

*Keywords: cyber crime, whistleblower, foreign threat, hegemonic stability, globalization era*

## **Pendahuluan**

WikiLeaks adalah organisasi media non-profit Internasional yang menyebut dirinya sebagai “an uncensorable system for untraceable mass document leaking” yang sekarang ini bermarkas di Swedia (Kelly, 2012: 246). Situs WikiLeaks sendiri terkenal akibat menerbitkan dokumen-dokumen rahasia dengan tetap menjaga kerahasiaan sumber-sumber yang memasoknya. Lepas dari nama dan sistem memasok dokumen-dokumen yang mirip dengan Wikipedia, namun WikiLeaks tidak memiliki ikatan apapun dengannya dan bukanlah merupakan sebuah wiki yang mana pengguna secara umum dapat mengedit dokumen-dokumen yang telah dimasukkan (Kelly, Ibid). Organisasi yang meluncurkan situs pada tahun 2006 tersebut didirikan oleh disiden politik Cina, jurnalis, matematikawan, dan teknolog dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan. Tentu dalam pendiriannya sendiri didorong oleh suatu

tujuan spesifik, serta dilandasi oleh konsep kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk menyuarkan keinginannya.

Timbul beragam pertanyaan tentang reaksi yang terjadi saat dokumen-dokumen rahasia yang telah berada di tangan WikiLeaks kemudian terpublikasikan. Secara umum, respons-respons dari pemerintah yang telah diketahui oleh publik terbingkai dalam: (1) tanggapan pemerintahan Amerika Serikat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *cyber-security*, (2) perundingan atas dampak pembocoran rahasia oleh WikiLeaks, dan (3) ditutup dengan bentuk respons Amerika Serikat terhadapnya. Maka dalam bab ini penulis akan mengulas tentang respons Amerika Serikat tersebut dengan mendetail, menjelaskan sejauh mana Amerika Serikat menangani kerugian yang dihasilkan WikiLeaks serta reaksi yang diberikannya setelah keamanan nasional mereka terancam.

### **Tanggapan Pemerintahan Amerika Serikat Mengenai *Cyber-Security***

Presiden Obama berbicara dengan sejumlah kepala negara termasuk para Pimpinan Perdana Menteri di Turki tentang kebocoran rahasia yang dialami oleh Amerika Serikat. Terlepas dari beberapa hal, pengendalian kerusakan dari WikiLeaks yang semacam ini dilakukan terutama oleh Departemen Luar Negeri sementara Departemen Pertahanan memeriksa ulang standar dari *cyber-security* negara tersebut. Tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat di antaranya adalah membentuk gugus tugas dalam Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri yang tidak hanya dibentuk untuk mengelola perilsan tetapi juga diperbolehkan melakukan investigasi kriminal (Bradbury, 2011:29). Amerika Serikat membentuk satgas khusus yang bertujuan menangani WikiLeaks, misalnya WikiLeaks Task Force (WTF) pada tanggal 22 Desember 2010 di bawah naungan CIA, bertugas menangani dampak secara langsung yang dihasilkan dari file-file rahasia yang baru saja dirilis (Miller, 2010), meminimalisir dampak tersebut, sekaligus untuk mempertahankan rasa percaya agensi rahasia dari negara-negara lain di dunia terhadap Amerika Serikat. *National Insider Threat Task Force* (NITTF) yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari *Federal Bureau of Investigation* (FBI), *Office of the National Counterintelligence Executive* (ONCIX), *Defense Intelligence Agency* (DIA), *Veterans Administration* (VA), dan *Department of Justice* (DOJ). Pada bulan November 2012, mendukung adanya perluasan koordinasi

antar lembaga dan pemeriksaan akan proses pelaksanaan yang telah dilakukan maka Presiden mengeluarkan *National Insider Threat Policy for Executive Branch Insider Threat Programs* melalui Memorandum Presidensial (ncsc.gov). Negara ini seolah-olah membujuk berbagai pihak termasuk di dalamnya negara-negara lain untuk ikut memerangi WikiLeaks beserta awak-awak yang berada di belakangnya, karena bagi mereka WikiLeaks dianggap telah melewati batasan dari standar-standar dan prasyarat mengenai kebebasan dan keterbukaan di bidang informasi.

Hal ini yang kemudian menyebabkan penangkapan Manning. Namun pihak dari Departemen Pertahanan hanya memiliki yurisdiksi atas anggotanya, seperti halnya Chelsea Manning yang sempat menjadi anggota unit militer Amerika Serikat. Penyelidikan terhadap Assange dan WikiLeaks sendiri berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman (Department of Justice) yang didasarkan dari 1.985 putusan dimana Undang-Undang Spionase tahun 1917 juga dapat diterapkan di luar negeri (Maurer:29), meskipun sampai saat ini masih belum menangkap Julian Assange dan melarang kinerja dari WikiLeaks akibat adanya fakta bahwa Assange tidak mendapatkan informasi rahasia tersebut dengan mencurinya sendiri atau secara langsung, melainkan dari pemasok yang menyetujui untuk berbagi sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya hukum dalam Konstitusi Amerika yang cukup untuk membawa Assange ke dalam jeruji besi (Lindenberger).

Pada akhirnya, "pemerintah sebenarnya tidak tahu persis berapa banyak orang secara keseluruhan yang memiliki izin keamanan untuk mengakses materi rahasia di sana" (Fitzpatrick, 2010). Sedangkan Departemen Pertahanan sebenarnya telah melarang penggunaan USB sticks untuk komputer-komputer dalam bangunan itu karena benda tersebut dianggap cukup kecil secara fisik untuk dapat dengan mudah memperbesar kemungkinan bocor, nyatanya Chelsea Manning disinyalir dapat menggunakan CD/DVD drives yang bahkan mampu untuk menulis ulang. Hal ini juga yang memungkinkan dirinya untuk menjembatani celah udara antara SIPRNet yang dianggap aman terhubung pada Internet umum di sana sampai akhirnya membocorkan materi-materi tersebut dengan menyimpannya dalam Internet. Selain itu Manning diyakini menggunakan enkripsi dan jaringan Tor yang memungkinkan untuk mentransfer data secara anonim melalui Internet, langkah-langkah itu merupakan cara bagaimana Manning dikatakan

mampu menyalin/mencuri dan membagikan data-data yang seharusnya rahasia.(Spiegel: 141-142) Namun dari segi keamanan sendiri, data-data yang dicuri berada dalam “Fort Knox” yang memang tidak begitu kuat pertahanannya sebagai sebuah model dalam Internet security yang kemudian oleh khalayak banyak disebut sebagai “Fort Knox problem” (Zittrain, 2010).

## **Perundingan atas Dampak Pembocoran Rahasia oleh WikiLeaks**

Setelah “Press Conference on Wikileaks Release of Confidential Documents” dengan pembicara Hillary Clinton diadakan pada tahun 2010 silam (American Rhetoric, 2010), konferensi yang lebih besar yakni "The Media World after Wikileaks and News of the World” kemudian diselenggarakan oleh organisasi Internasional non-pemerintahan World Press Freedom Committee (WPFC) bekerja sama dengan UNESCO. Pertemuan ini dihadiri oleh pembicara-pembicara dari berbagai bagian dunia, mengutarakan pendapat mengenai isu yang dibicarakan dalam perspektif yang berbeda-beda. Namun konferensi ini mendapatkan kecaman oleh berbagai kalangan terutama WikiLeaks, karena pihak yang memainkan peran besar dalam isu tersebut selama bertahun-tahun yakni WikiLeaks sendiri tidak diperbolehkan mengirimkan perwakilan mereka untuk bergabung dalam perundingan yang diadakan. Hal ini sama saja dengan mengadakan konferensi mengenai The Pentagon Papers tanpa mengundang Daniel Ellsberg beserta para editor dan pembawa berita The New York Times sebagai pembicara. Mengenai ketidakadilan tersebut, dalam sebuah press WikiLeaks pun angkat bicara:

*“The large two-day conference, which has 37 speakers listed, is to be held UNESCO Headquarters in Paris. US organizers have stacked the conference with WikiLeaks opponents and blocked all speakers from WikiLeaks, stating that the decision to censor WikiLeaks representation was an exercise in ‘freedom of expression... our right to give voice to speakers of our choice’.”* (Pangburn, 2012)

Julian Assange menambahkan, *“UNESCO has made itself an international human rights joke. To use ‘freedom of expression’ to censor WikiLeaks from a conference about WikiLeaks is an Orwellian absurdity beyond words.”* Hal tersebut membuktikan juga bahwa posisi Amerika Serikat sebagai penguasa dominan nyatanya berhasil

mengumpulkan pembicara-pembicara dari berbagai belahan dunia tanpa mereka mempertanyakan ketidakadilan mengenai sebuah konferensi yang membicarakan pihak tertentu tanpa memanggil perwakilan dari pihak tersebut untuk dapat mengutarakan perspektifnya.

Beragam pandangan kemudian terbentuk baik itu dari individual, pihak-pihak ahli, hukum perundang-undangan, sampai dengan pemerintahan resmi negara-negara lain dan tentunya Amerika Serikat berkaitan dengan sasaran maupun tujuan dari organisasi WikiLeaks. Di satu sisi mereka berpendapat bahwa informasi yang dibocorkan dan dipublikasikan oleh WikiLeaks merupakan 'free speech' yang dasarnya terlindungi, berikut anggapan mereka bahwa organisasi tersebut berupaya mewujudkan sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terbuka. Sedangkan sisi yang lainnya percaya bahwa situs maupun orang-orang yang berkomplot dengan WikiLeaks akan menghadapi teguran resmi di berbagai negara akibat bermain dalam isu-isu privasi, pengungkapan informasi pemerintah yang sensitif dan rahasia, dan juga dikaitkan dengan perkara hukum perdata mengenai publikasi informasi yang menurut mereka palsu, memfitnah dan mencemarkan nama baik.

Kerusakan sendiri telah menjadi salah satu elemen utama dalam diskusi mengenai dampak yang dihasilkan dari perilsan oleh WikiLeaks. Singkatnya, gambaran akan situasi pihak-pihak yang terkait menjadi berantakan terutama bagi negara Amerika Serikat. Ada beberapa tantangan metodologis dalam melihat akibat dari kasus ini, bagaimana ada banyak variabel-variabel yang dinilai sulit untuk diukur seperti kemerosotan atas kepercayaan antar diplomat atau indikator relevan dari jumlah panggilan telepon per bulan yang tidak tersedia untuk diketahui umum. Burns misalnya mengemukakan bahwa *“Diplomacy in my judgment, diplomacy among governments is built on trust among diplomats”* (Burns, 2011: 55) yang dinyatakan secara langsung oleh mantan rekannya dari Prancis, Bernard Kouchner, pendiri *“Doctors without Borders”*, *“We will all terribly mistrust each other. That is the risk”* (Maurer: 25).

Faktanya memang ada sejumlah pejabat pemerintah di Amerika Serikat maupun luar negeri yang harus meninggalkan pekerjaan mereka atau dipindahkan, termasuk di dalamnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Meksiko dan Ekuador, seorang pejabat diplomatik yang sementara mengambil alih tempat duta (*chargé d'affaires*) di

Turkmenistan, dan seorang pejabat partai Jerman. Beberapa dari pihak-pihak yang menempatkan perhatian akan potensi kerusakan dari perilsan WikiLeaks adalah organisasi-organisasi HAM termasuk di dalamnya Amnesty International, "Reporters without Borders" mengirim surat kepada *Wall Street Journal* beberapa tahun lalu menyerukan permintaan mereka agar WikiLeaks mengubah kebijakan yang diterapkannya (Maurer, Ibid.).

## **Bentuk Respons Amerika Serikat terhadap Ancaman WikiLeaks**

Pembublikasian dari dokumen-dokumen yang telah bocor, terutama kabel-kabel diplomatiknya, menarik perhatian mendalam dari seluruh penjuru dunia termasuk bagaimana beberapa pemerintah kemudian memblokir situs-situs yang berisi rincian memalukan. Alan Rusbridger, seorang editor dari surat kabar *The Guardian*, mengatakan:

*"I can't think of a time when there was ever a story generated by a news organisation where the White House, the Kremlin, Chávez, India, China, everyone in the world was talking about these things. I've never known a story that created such mayhem that wasn't an event like a war or a terrorist attack."*

WikiLeaks sangat berpengaruh terhadap konstelasi demokrasi terutama negara-negara yang menerapkannya, salah satunya adalah Amerika Serikat. Dilihat dari tanggapan yang diberikan negara adidaya tersebut terutama setelah pembocoran informasi rahasia secara besar-besaran pada tahun 2010, Amerika Serikat seolah-olah menjadikan WikiLeaks sebagai musuh besarnya. Keseluruhan dari respons-respons yang diberikan oleh pemerintahan Amerika Serikat sendiri dapat dikategorikan dalam empat komponen sebagai berikut (seperti yang pernah dijelaskan oleh Davies dari surat kabar *The Guardian* dan ditujukan untuk Assange):

### *Legal Response*

Dalam hal ini terlihat sekali bahwa pemerintahan Amerika Serikat berjuang untuk menemukan cara menuntut Julian Assange dan Private First Class (PFC) Bradley Manning yang telah merubah jenis kelaminnya dan sekarang dipanggil dengan nama Chelsea Manning, salah seorang pembocor rahasia kabel-kabel diplomatik negara

tersebut yang bekerja untuk U.S. Army Intelligence. Tentang siapa yang tergolong sebagai whistle-blower dan yang bukan berakhir di tangan negara sebagai penentu hal tersebut. Seolah pemaksaan transparansi pemerintah di negara-negara lain harus ditinggikan namun hal tersebut tidak bekerja bagi mereka yang memaksa transparansi di negara Amerika Serikat.

Awalnya, pemerintah ingin mengadili Assange di bawah Espionage Act of 1917 (Kohn, 2010), yang mana undang-undang ini berusaha untuk mencegah pencurian rahasia-rahasia negara menyangkut pertahanan nasionalnya yang bertujuan melukai negara Amerika Serikat; upaya-upaya yang dilakukan demi mendorong orang lain agar menolak untuk memenuhi tugas mereka; dan obstruksi rekrutmen atau pendaftaran militer. Pemerintahan Amerika Serikat dalam menghadapi WikiLeaks tampaknya memfokuskan investigasi mereka pada Undang-Undang ini, respons yang juga diberikannya pada saat Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dingin (Weiss, 2010). Pada saat itu, ketentuan-ketentuan yang tertulis dimaksudkan agar dapat menekan orang-orang untuk mengungkapkan informasi rahasia yang berkaitan dengan pertahanan nasional, informasi-informasi yang diduga dapat membantu negara asing maupun merugikan Amerika Serikat (Light, 2010).

Namun masalah yang dihadapi oleh pemerintah Amerika saat ini ialah konteks dalam sistem publikasi Wikileaks yang benar-benar berbeda. Pada dasarnya, tujuan dari Undang-Undang tersebut ada dua yakni melindungi dokumen-dokumen yang sensitif terhadap pertahanan nasional, dan mencegah adanya propaganda perang (Steinmetz: 34). Di sini pemerintah Amerika Serikat sama sekali tidak menghadapi satu atau beberapa agen asing, pembeberan rahasia yang dilakukan juga tidak bertujuan untuk membantu negara asing atau merugikan Amerika Serikat melainkan murni "untuk membawa informasi dan berita penting kepada publik" (Wikileaks.org). Permasalahan dalam penggunaan Undang-Undang Spionase terhadap Julian Assange adalah bagaimana ia bukanlah seorang warga negara dan bukan pula orang yang dari awal berinisiatif untuk membocorkan dokumen-dokumen tersebut sehingga penuntutan terhadapnya tidaklah mungkin.

Permasalahan ini kemudian menghasilkan sebuah usulan dari kedua majelis Kongres, disebut sebagai "the SHIELD Act" (Securing Human Intelligence and Enforcing Lawful

Dissemination Act). Undang-undang ini ditujukan sebagai sebuah amandemen terhadap Undang-Undang Spionase. Undang-Undang yang baru akan "membuat siapa saja yang mempublikasikan nama dari sumber badan intelijensi Amerika Serikat digolongkan sebagai sebuah tindak kejahatan federal, sebuah pukulan keras secara langsung bagi situs pembocor rahasia seperti WikiLeaks." (Poulsen, 2010) Berikut adalah pernyataan tertulis dari Senator Joseph Lieberman mengenai hal ini:

*"The recent dissemination by Wikileaks of thousands of State Department cables and other documents is just the latest example of how our national security interests, the interests of our allies, and the safety of government employees and countless other individuals are jeopardized by the illegal release of classified and sensitive information. This legislation will help hold people criminally accountable who endanger these sources of information that are vital to protecting our national security interests."* (Poulsen, 2010)

Usulan tersebut ditolak karena dapat melukai atau melanggar Amandemen Pertama, yakni adanya kemungkinan bagi orang-orang yang ikut mempublikasikan pembocoran dokumen-dokumen rahasia setelah menerimanya juga akan ikut terkena. Dengan kata lain, pemerintah seolah-olah hanya ingin membentuk sebuah keterkaitan secara langsung antara Assange dengan Manning. Apabila koneksi itu terbentuk maka besar kemungkinannya bukan hanya Manning yang dapat terjerat gugatan atas tindakannya melainkan juga Assange, dituntut atas konspirasi pempublikasian di bawah Undang-Undang Spionase (Savage, 2010).

Namun setelah pernyataan dari Senator Lieberman, Amazon yang awalnya merupakan server yang digunakan WikiLeaks memutuskan untuk mengakhiri hubungan bisnis antar keduanya. WikiLeaks menerbitkan URL baru mereka melalui Twitter meski sempat berganti lagi akibat pemerintah Perancis menindak server mereka yang baru sehingga situs tersebut jatuh pada pilihan terakhir yakni menggunakan server Swedia yang mana di negara tersebut terdapat perlindungan kebebasan berbicara paling kuat. (Benkler: 28, 29)

Dilihat dari respons yang diberikan, pemerintahan Amerika Serikat tidak berupaya sama sekali melindungi whistle-blowers dan justru malah sebaliknya yang terjadi.

Amerika Serikat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang dikategorikan whistle-blowers, dan selama berbahaya maka negara ini akan mencari cara untuk mengadili mereka yang bahkan tidak dikategorikan ke dalamnya sekalipun. Bentuk nyata dari pengabaian perlindungan terhadap pembocor rahasia ditunjukkan pada PFC Chelsea Manning, yang pada tahun 2013 lalu divonis hukuman 35 tahun penjara akibat “mencuri” dokumen-dokumen rahasia saat ditugaskan dalam unit Angkatan Darat di Irak pada tahun 2009 sebagai seorang analis intelijen di sana. Dari sinilah Manning memiliki akses ke database rahasia dan berakhir menyerahkan apa yang diambilnya kepada WikiLeaks untuk dipublikasikan terhadap publik. Meskipun perlakuan terhadap Manning di bawah federal Amerika Serikat dan hukum militer mungkin dianggap legal, namun perlakuan tersebut tidak sepatasnya diterima oleh seorang whistle-blower yang seharusnya layak mendapatkan perlindungan dari Administrasi Obama seperti yang telah dijanjikan.

Chelsea Manning ditangkap oleh CID (Criminal Investigation Division) Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei 2010 yang sekarang telah berganti nama menjadi United States Army Criminal Investigation Command, dan ditransfer empat hari kemudian ke perkemahan Arifjan di Kuwait. Manning didakwa dengan beberapa pelanggaran, termasuk di dalamnya pelanggaran Pasal 92 dan 134 dari UCMJ (Uniform Code of Military Justice), dan Undang-Undang Spionase. Pelanggaran yang paling serius ditujukan padanya adalah tuduhan membantu musuh, sebuah pelanggaran berat meskipun jaksa mengatakan bahwa mereka tidak akan menjatuhkan hukuman mati. Pengacara Manning berpendapat bahwa pemerintah telah membesar-besarkan bahaya yang disebabkan dari perilsan dokumen-dokumen oleh kliennya, belum lagi paksaan terhadap Manning agar memberikan bukti yang dapat mereka pakai untuk bisa melawan Assange dan juga bagaimana kebingungan Manning atas identitas gendernya yang dianggap mempengaruhi perilaku dan pembuatan keputusan yang dilakukan tidaklah disertakan menjadi buah perhitungan. Berikut adalah permintaan maaf Manning dalam pengadilan:

*“I am sorry that my actions hurt people. I'm sorry that they hurt the United States. I am sorry for the unintended consequences of my actions. When I made these decisions I believed I was going to help people, not hurt people. At the time of my decisions I was dealing with a lot of issues.”*

Manning semasa hidupnya akrab dengan konflik batin baik itu permasalahan gender yang dideritanya, penindasan atau bullying, perceraian orang tua sampai dengan masalah keluarga yang lain. Tujuannya untuk lari dari semua itu dengan mencoba menjalani hidup baru dalam lingkup militer Amerika Serikat malah membuat tekanan mental yang dideritanya semakin besar, salah satu penyebab kepercayaan dirinya menjadi goyah ialah saat Manning dihadapkan pada fakta akan banyaknya rahasia-rahasia gelap milik negara tempat ia tinggal yang menurutnya patut diinformasikan kepada publik. Hal tersebut yang menyita perhatian masyarakat untuk membela tindakan Manning yang menurut mereka lebih patut dipanggil sebagai pahlawan daripada pengkhianat, termasuk mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi HAM seperti Amnesty Internasional.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah Manning lakukan sebenarnya membuat dirinya dapat dijatuhi hukuman maksimum 90 tahun, namun pemerintah dan pengacara meminta keringanan sehingga ia berakhir dijatuhi hukuman 35 tahun penjara, bersamaan dengan pengurangan peringkat, penyitaan semua gaji dan tunjangan, serta pemberhentian secara tidak hormat. Ruang gerak Manning sendiri dibatasi hanya pada USDB (United States Disciplinary Barracks) yang berada di Kansas. Sampai dengan saat ini beberapa pihak seperti halnya organisasi-organisasi HAM mencoba membujuk agar keringanan yang lebih lagi diberikan kepada Manning, seperti halnya jika beberapa tahun ke depan ia menunjukkan perilaku baik. Namun sampai saat ini usaha-usaha tersebut tidaklah digubris, termasuk pada tanggal 14 April 2014 ketika permintaan grasinya ditolak oleh pengadilan sehingga pengabulan agar kasus Manning dibawa menuju United States Army Court of Criminal Appeals masih ditunda hingga adanya keputusan lebih lanjut.

### *Physical Response*

Meskipun tidak berada dalam posisi resmi dalam Eksekutif negara yang mana bertanggung jawab dalam pemberlakuan kebijakan atau undang-undang secara langsung, sejumlah orang dengan terbuka menyerukan respons fisik untuk diberlakukan terhadap para pembocor rahasia seperti di antaranya Mike Rogers, seorang anggota Kongres dari Michigan yang menyarankan dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelanggar. Retorika yang digunakan berkisar dari kecaman sederhana, sampai dengan ancaman akan hukuman legal, dan bahkan panggilan untuk eksekusi (Steinmetz, 2012: 31). Sebagai

contoh nyata, situs WikiLeaks.org pernah dimatikan selama 2 minggu di negara Amerika Serikat, sebagai sebuah perintah dari pengadilan sesaat setelah publikasian beberapa dokumen yang berkaitan dengan tuduhan pencucian uang, grand lacerny, serta penyingkiran pajak oleh Bank Julius Bare di kepulauan Cayman dan Swedia. Pengaduan pengadilan terhadap WikiLeaks kemudian dicabut oleh Bank Julius Bare sendiri, sehingga perintah awal dari pengadilan Amerika Serikat ditarik bersamaan dengan pemulihan kembali situs WikiLeaks di negara tersebut.

Amerika Serikat juga menjalin kerjasama bersama lembaga-lembaga pemerintah internal beserta korporasi-korporasi di dalam negara tersebut, contohnya alamat WikiLeaks.org dihapus permanen oleh penyediaanya dan disusul oleh EveryDNS.net. Banyak pihak menarik donasi yang merupakan penyokong finansial WikiLeaks, dan banyak negara juga memblokir situs tersebut untuk dapat diakses di dalam negeri seperti contohnya Thailand dan China.

Secara keseluruhan, pemerintahan Obama telah mendakwa kurang lebih lima pegawai pemerintah akibat membocorkan informasi-informasi rahasia kepada media termasuk di dalamnya Jeremy Hammond dan Barrett Brown, dan sejauh ini tidak pernah ada presiden Amerika Serikat lain yang telah tercatat mengurus lebih dari satu penuntutan yang sedemikian rupa (Shane, 2011). Padahal kemungkinan dari adanya respons hukum dari awal telah dibatasi oleh kesulitan-kesulitan umum dari cyber-law sendiri. Pihak-pihak terkait dihubungkan dengan ketidakpastian akan yurisdiksi dalam internet yang secara teoritis tanpa batas, dan masalah atribusi atau keterkaitan antar satu pihak dengan yang lain, termasuk juga konsekuensi-konsekuensi yang tidak terantisipasi. Selain itu, mereka menghadapi tantangan khusus dalam kasus ini yakni mengenai pertanyaan yang masih belum terjawab tentang apakah WikiLeaks terlindung di bawah Amandemen Pertama atau tidak seperti yang tersorot sebagai pokok terpenting dalam laporan mengenai WikiLeaks oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Benkler, 2011: 6).

Salah satu contoh dari tantangan yurisdiksi yang dihadapi oleh negara ini beserta masalah atribusi yakni dalam kasus bank Julius Baer, korban awal dari perilsan oleh WikiLeaks yang mengungkap praktik pencucian uang di sana (Domscheit-Berg, 2011: xi). Baer dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dalam mencari tahu di negara mana kemungkinan akan perilsan dianggap ilegal dan terhadap siapa di tempat pertama

dakwaan harus diajukan. Bank telah mencoba untuk mendakwa Daniel Mathews, salah satu orang yang namanya dikaitkan dengan WikiLeaks akibat domain miliknya telah terdaftar dan ia juga merupakan figur yang bisa dituntut di negara Amerika Serikat sebagai seorang mahasiswa di Stanford. Namun, Mathews di sini didukung oleh pihak-pihak lain seperti American Civil Liberties Union dan Electronic Frontier Foundation, dan kasus tersebut berakhir ditarik kembali oleh Baer. CBS News bahkan melaporkan kejadian ini kepada publik dengan memberi judul 'Freedom of Speech has a number', yakni alamat IP dari WikiLeaks (Domscheit-Berg, 2011: 21).

Julian Assange, juru bicara sekaligus pendiri WikiLeaks juga tengah menghadapi tuduhan penyerangan seksual yang dijatuhkan oleh negara Swedia dan dibantu oleh Inggris, sehingga selama lima tahun lebih Julian Assange berlindung di bawah kedutaan besar Ekuador di Inggris tanpa dapat meninggalkan bangunan itu akibat adanya penjagaan ketat sampai pada tahun 2015 silam. Baru pada bulan Februari 2016, Julian Assange memberikan pernyataan bahwa ia akan menyerahkan dirinya apabila putusan panel PBB yang membahas mengenai kesewenang-wenangan pihak Swedia dan Inggris terhadap penahanannya berakhir memihak kedua negara tersebut.

Panel ini ternyata menuntut baik itu otoritas Swedia maupun Inggris untuk mengakhiri "perampasan kemerdekaan" terhadap Assange, menghormati integritas fisik dan kebebasan Bergeraknya serta sebuah pengharapan bagi pihak-pihak tersebut untuk menawarkan kompensasi atas tindakan yang dilakukan mereka selama ini (The Guardian, 2016). Tiga dari lima anggota pada panel tersebut mendukung keputusan yang memenangkan Assange, hal ini tentu saja membuat kedua negara tersebut angkat bicara karena bagi mereka Assange tak pernah kehilangan kebebasannya maupun ditahan di dalam. Ia memasuki bangunan tersebut atas kehendaknya sendiri agar tidak ditahan ketika keluar dari kedutaan Ekuador (Bruce, 2016). Assange membantah tuduhan perkosa oleh Swedia pada tahun 2010 lampau, mengatakan bahwa tuduhan itu hanyalah plot semata yang akhirnya akan membawanya ke Amerika Serikat di mana penyelidikan atas aktivitas yang dilakukan WikiLeaks masih terbuka lebar. Julian Assange didukung sepenuhnya oleh pihak Ekuador, dalam perkara ini Perdana Menteri negara tersebut, Ricardo Patiño, menyatakan:

*"It is time for both governments (Britain and Sweden) to correct their*

*mistake, time for them to allow Julian Assange his freedom, time for them to end this arbitrary detention and furthermore compensate the damage done to this man. We've said it from the beginning, but now we're not the only ones. This is obvious political persecution. That has been absolutely demonstrated.*" (Bruce, 2016)

Bahkan Presiden dari Ekuador, Rafael Correa, menyatakan bahwa ia dan negaranya yang selama ini mengambil tindakan tepat dengan berada di pihak Assange. Beliau menambahkan bahwa mereka telah mengeluarkan banyak biaya untuk itu, seperti halnya penyewaan mata-mata, pemertahanan keamanan di sekitar kedutaan serta pembiayaan atas Assange yang tinggal di sana. Namun dari pihak PBB tak berkata apapun tentang penggantian atas kerugian tersebut, selain kompensasi yang layak diberikan kepada Assange atas kebebasan yang telah terenggut darinya lima tahun ini.

#### *Technological Response*

Pada tanggal 14 Desember 2010, Departemen Kehakiman meminta akses pada sejumlah akun Twitter termasuk di dalamnya milik Assange dan Parlemen Islandia. Ada juga laporan dari *grand jury* (dipilih untuk menguji validitas dari tuduhan sebelum sidang) rahasia di Alexandria, Virginia. Crovitz memberikan paparan yang tepat dalam konteks penjatuhan hukuman secara legal, bahwa "*It's the political motivation of Mr. Assange that qualifies him to be prosecuted*" di bawah Undang-Undang Spionase. Beliau menunjukkan bahwa yang membedakan antara Assange dengan surat kabar *The New York Times* adalah bagaimana Assange memang memiliki maksud atau tujuan untuk merugikan Amerika Serikat (Crovitz, 2011).

Memang belum ada pejabat pemerintah yang menyarankan penuntutan terhadap para pembawa berita ke pengadilan, namun *The New York Times* menerbitkan potret kritis akan sosok Assange hanya sehari setelah penerbitan kabel-kabel diplomatik yang mereka dapat dari WikiLeaks, dan hal ini digolongkan suatu tindakan yang ditafsir sebagai upaya untuk memberi jarak antara posisi mereka dengan WikiLeaks atau menunjukkan bahwa surat kabar tersebut berada di pihak netral yang benar-benar hanya ingin memberikan

informasi kepada publik lepas dari sumber dan juga status materi dari berita yang dipublikasikan (Der Spiegel: 230, 232). WikiLeaks sendiri kemudian mengubah kata-kata dari situs web mereka dari yang awalnya “*Submitting documents to WikiLeaks is safe, easy and protected by law*” menjadi “*Submitting documents to our journalists is protected by law in better democracies*” serta pernyataan bahwa “*WikiLeaks accepts a range of material, but we do not solicit it*” dan daftar dari materi-materi yang 'paling dicari' tidak lagi bereferensi pada materi-materi yang rahasia (Domscheit-Berg: 262).

Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat tidak pernah terlihat terlibat dalam kasus *cyber attack* melawan WikiLeaks, namun tahun 2010 memang dapat dianggap merupakan *cyber-conflict* pertama kali dalam jenis ini di lingkup global. Meskipun telah terdapat serangan DDoS melawan negara Estonia pada tahun 2007 atau insiden Google dan serangan Stuxnet pada tahun 2010 yang dilaporkan telah mengganggu beberapa hubungan bilateral berbagai pihak, namun hanya di kasus ini yang mana setelah terilisnya kabel-kabel diplomatik *hacker-hacker* dari Amerika Serikat serentak menyerang WikiLeaks di dunia maya, begitu juga pembatalan hubungan bisnis dari beberapa perusahaan multinasional Amerika Serikat, Perancis, dan Swiss dengan WikiLeaks, serta kelompok *hacktivist* yang disebut Anonymous menyerang perusahaan-perusahaan tersebut sebagai bentuk pembalasan, sementara situs-situs seperti WikiLeaks dengan tujuan yang hampir sama bermunculan di seluruh dunia. Der Spiegel menyatakan, “*It constitutes the biggest international revolt in the net up to date.*” (Spiegel: 279) Ini adalah contoh maupun bukti kuat sebuah difusi atas kekuatan aktor non pemerintah, yang dalam buku Nye secara eksplisit menyebutkan nama WikiLeaks (Nye, 2011).

Pada tanggal 29 November 2010 beberapa saat setelah dirilisnya kabel-kabel diplomatik Amerika Serikat, sebuah serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) diluncurkan oleh seorang *hacktivist* dengan sebutan "The Jester" ( "th3j35t3r" karena hacker cenderung menggantikan huruf 'e' dengan nomor '3' dan 's' dengan '5') untuk melawan situs WikiLeaks (Spiegel: 271). Serangan DDoS ini dinilai delapan kali lebih besar dari serangan DDoS sebelumnya yang pernah menyerang WikiLeaks, memuncak sampai pada 18Gbps (The Guardian: 203). Kelompok *hacktivist* Anonymous kemudian memutuskan untuk melancarkan serangan balik, menargetkan perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, PayPal, dan MasterCard ketimbang perusahaan-perusahaan lainnya

yang lebih mudah diretas (Spiegel: 273).

Dalam beberapa hari saja 1.200 *mirror sites* (salinan lengkap dari situs yang ditempatkan di bawah URL yang berbeda tetapi identik di setiap sisi) telah bermunculan di Internet yang membuat serangan DDoS dan tindakan perusahaan-perusahaan tersebut di atas sebagian besar tidak efektif (Spiegel: 278). Domscheit-Berg dalam kasus ini menyatakan, *“It was virtually impossible to take us off the Internet”* (Domscheit-Berg: 21). Namun, tindakan dari PayPal dan penyedia jasa keuangan lainnya berhasil membatasi akses WikiLeaks demi mendapatkan dana dan sumbangan-sumbangan yang datang untuk mereka.

### *Public Relations*

Beberapa pihak memperdebatkan tentang respons yang pemerintah ambil berlawanan dengan apa yang Sekretaris Clinton utarakan dalam pidatonya mengenai kebebasan di Newseum, Washington pada bulan Januari 2010 yang menggambarkan Internet sebagai *“a new nervous system for our planet. In many respects, information has never been so free. Even in authoritarian countries, information networks are helping people discover new facts and making governments more accountable”*. Pidato Clinton pada tanggal 15 Februari 2011 kemudian menanggapi kritik yang ia dapat ini dan menegaskan kembali pada masyarakat mengenai komitmen pemerintah atas internet bebas, ia menjelaskan bahwa *“The fact that WikiLeaks used the internet is not the reason we criticized its actions. WikiLeaks does not challenge our commitment to internet freedom”* (Domscheit-Berg: 21).

Perilisan pertama mengenai Afghanistan belum begitu menghasilkan reaksi yang seberapa dari publik terutama oleh pemerintahan Obama sendiri. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dikarenakan isi perilisan yang sebagian besar membicarakan mengenai strategi perang seharusnya ditangani oleh pendahulu Presiden Obama (Spiegel: 173). Namun tetap saja, Departemen Pertahanan membentuk sebuah "Information Review Task Force" yang terdiri dari 120 orang dipimpin oleh Jenderal Robert A. Carr dari Badan Intelijen Pertahanan untuk meninjau kabel-kabel diplomatik yang dirilis dan juga menemukan bukti-bukti yang tidak hanya digunakan untuk mengungkap sumber yang membocorkan rahasia Amerika Serikat melainkan juga untuk melawan Assange dan

WikiLeaks (Spiegel: 175-176).

Respons yang didapat dari publikasian kabel-kabel Irak juga serupa, namun reaksi media terhadap informasi-informasi yang terungkap dinilai lebih kritis (Spiegel: 223). Melihat banyaknya kabel-kabel diplomatik yang dibocorkan termasuk di dalamnya kabel-kabel dari pemerintahan Obama menghasilkan respons pemerintah yang lebih agresif. Departemen Luar Negeri akhirnya juga membentuk gugus tugas setelah mengamati perilsan yang akan datang beberapa hari sebelumnya (Spiegel: 225, *The Guardian*: 199). Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa perilsan tersebut “*not just an attack on America’s foreign policy interests. It is an attack on the international community*” (Spiegel: 2, Benkler: 15) hingga Wakil Presiden Biden sendiri secara langsung menyatakan bahwa sosok Assange “*more like a high-tech terrorist than the Pentagon Papers*” (Huffpost, 2011).

Menurut Der Spiegel, pemerintah mempertikaikan bagaimana kabel-kabel yang dibocorkan oleh WikiLeaks tidak mengungkapkan suatu isu yang baru seperti yang disebutkan dalam pidato Presiden di Rose Garden, namun informasi-informasi tersebut memang menjadi resiko atas terancamnya kehidupan orang-orang (Spiegel: 179-182). *The New York Times* menambahkan argumen dengan pemerintah bahwa dengan kerja sama mereka bersama WikiLeaks, maka organisasi-organisasi berita “*compromised their impartiality and independence*”. Hal ini kemudian memperkuat perkataan Assange yang menganggap dirinya sebagai seorang dalang bagi boneka-boneka miliknya yakni organisasi-organisasi berita (Maurer: 33).

Berbicara mengenai hubungan pemerintahan dengan media sendiri, Gedung Putih mengirim email ke organisasi-organisasi media yang isinya menyatakan bahwa WikiLeaks tidaklah bersifat objektif melainkan melawan Amerika Serikat (Spiegel: 173). Pemerintahan meminta mereka untuk menahan penyebarluasan informasi-informasi yang bocor demi melindungi (i) informan, (ii) program-program sensitif negara, dan (iii) upaya kontraterorisme (*counterterrorism*). Selain itu, pemerintah akan memfokuskan diri mereka terhadap Manning yang saat ini telah berada dalam tahanan dan eksistensi dari organisasi WikiLeaks sendiri yang belum juga dapat mereka hancurkan (Spiegel: 227). Meskipun begitu tetap saja Gedung Putih meminta kepada pihak-pihak yang masih membantu WikiLeaks untuk menahan setiap informasi yang berkaitan dengan

kepentingan nasional serta adanya nama-nama pejabat asing yang tertera di sana sebelum dipublikasikan (Spiegel: 228-229). Tanggapan dari surat-surat kabar yang bekerjasama dengan WikiLeaks tidaklah sepenuhnya setuju dengan permintaan mereka, terutama *The New York Times* yang menyatakan ketidakyakinannya untuk dapat mengabdikan permintaan penahanan informasi tersebut (Maurer: 33).

Senator Lieberman juga secara tegas meminta kerjasama pihak-pihak lain untuk menghancurkan WikiLeaks, yakni:

*“I call on any other company or organization that is hosting WikiLeaks to immediately terminate its relationship with them. WikiLeaks’ illegal, outrageous, and reckless acts have compromised our national security and put lives at risk around the world. No responsible company – whether American or foreign – should assist WikiLeaks in its efforts to disseminate these stolen materials.”*

Indikasi bahwa tekanan pemerintah berhasil membujuk atau mempengaruhi tindakan dari beragam perusahaan adalah bagaimana PayPal secara langsung menyuarakan pada sebuah konferensi di Paris bahwa “The State Department told us, the activities are illegal”. Pada saat yang sama, Sekretaris Clinton menyatakan dalam sambutannya pada tanggal 15 Februari 2011 mengenai “Internet Rights and Wrongs: Choices & Challenges in a Networked World”:

*“There were reports in the days following these leaks that the United States Government intervened to coerce private companies to deny service to WikiLeaks. That is not the case. Now, some politicians and pundits publicly called for companies to disassociate from WikiLeaks, while others criticized them for doing so. Public officials are part of our country’s public debates, but there’s a line between expressing views and coercing conduct. Business decisions that private companies may have taken to enforce their own values or policies regarding WikiLeaks are not at the direction of the Obama administration”.* (Stage.gov)

WikiLeaks sebagai pembocor rahasia tentunya siap tidak siap harus menanggung akibat dari keberaniannya melawan dunia, mereka tidak melihat bahwa WikiLeaks juga memiliki tujuan baik agar jurnalisme tak lagi memaparkan berita secara subjektif. Ketika

keobjektifan yang berusaha dicapai WikiLeaks dianggap melukai diplomasi pihak-pihak tertentu terutama Amerika Serikat akibat adanya informasi-informasi yang menurut mereka memang tidak berhak diketahui oleh publik, maka beranekaragam “serangan balik” kemudian ditargetkan pada WikiLeaks yang sekarang ini berada dalam kondisi yang cukup buruk—yang mana fakta ini tak begitu mengejutkan bagi publik melihat aktivitas yang situs ini telah lakukan beberapa tahun terakhir.

Semenjak Desember 2010 WikiLeaks telah menghadapi pemblokiran dari banyak pihak bank, perusahaan-perusahaan kartu kredit dan juga Paypal, sebagai penghalang mereka untuk mendapatkan donasi yang juga merupakan satu-satunya pemasukan finansial bagi WikiLeaks. Dari dalam WikiLeaks sendiri ada pertikaian pendapat, salah satunya pengkhianatan mantan anggota mereka Daniel Domscheit-Berg yang meninggalkan WikiLeaks untuk membentuk situs pembocor rahasianya sendiri yakni OpenLeaks. (Terbentuk pada bulan Januari 2011, OpenLeaks masih belum mempublikasikan apapun). Kemudian di tahun 2011 juga terungkap fakta bahwa tiga perusahaan besar; HBGary Federal, Palantir, dan Berico, yang dikenal sebagai Team Themis bekerja sama untuk menargetkan WikiLeaks, para aktivis sayap kiri dan juga jurnalis bernama Glenn Greenwald dari Salon.com atas permintaan langsung dari Bank Amerika. Rencana ini dapat terungkap setelah Anonymous membajak dan mempublikasikan beberapa e-mail internal antar perusahaan tersebut. Berico dan Palantir kemudian memutuskan hubungan dengan HBGary Federal, dan CEO mereka Aaron Barr mengundurkan diri. (Pada bulan Februari 2012 HBGary dibeli oleh ManTech Internasional, sebuah perusahaan kontraktor pertahanan dan intelijensi.)

## **Penutup**

Amerika Serikat sebagai negara hegemon atau penguasa dominan berusaha mempertahankan posisi mereka meskipun mereka harus menjilat ludah sendiri, seperti halnya dalam permasalahan perlindungan *whistle-blower* yang mana siapa yang tergolong dilindungi dan yang tidak berakhir di tangan negara ini. Pemaksaan transparansi pemerintah di negara-negara lain tetap harus ditinggikan, namun hal tersebut tidak bekerja bagi mereka yang memaksa transparansi di negara Amerika Serikat. Jelas bahwa Amerika Serikat terus menghalangi pihak-pihak lain untuk berada di sisi WikiLeaks,

kesetiaan Swedia terhadap negara ini juga yang membuat Assange kesulitan meninggalkan kedutaan Ekuador (Milne, 2012).

### Referensi:

- About Chelsea Manning. *Wikipedia*. Diakses pada tanggal 25 Maret 2016, pukul 23.51 WIB. [https://en.wikipedia.org/wiki/Chelsea\\_Manning](https://en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Manning).
- About WikiLeaks. *WikiLeaks*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 01.20 WIB. <https://wikileaks.org/About.html>.
- American Rhetoric. (2010). *Press Conference on Wikileaks Release of Confidential Documents*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2016, pada pukul 17.24 WIB. <http://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonwikileakspressspeech.htm>.
- Benkler, Y. (2011). *A Free Irresponsible Press: WikiLeaks and the Battle over the Soul of Networked Fourth Estate*. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review.
- Biden Makes Case For Assange as a ‘High-Tech Terrorist’. (2011). *Huffpost*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 02.31 WIB. [http://www.huffingtonpost.com/2010/12/19/joe-biden-wikileaks-assange-high-tech-terrorist\\_n\\_798838.html](http://www.huffingtonpost.com/2010/12/19/joe-biden-wikileaks-assange-high-tech-terrorist_n_798838.html).
- Bradbury, Steven G. (2011). *The Developing Legal Framework for Defensive and Offensive Cyber Operations – Keynote Address Harvard National Security Journal Symposium ‘Cybersecurity: Law, Privacy, and Warfare in a Digital World’*.
- Burns, (2011), dalam Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy. Executive Session on WikiLeaks. Cambridge: Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard Kennedy School.
- Domscheit-Berg, D. & Klopp, T. (2011). *Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous Website*. New York: Crown Publishers.
- Fitzpatrick, John. (2010). *Hearing on Security Clearance Policy Subcommittee on Intelligence Community Management House Permanent Select Committee on Intelligence*. Diakses pada tanggal 26 Maret 2016, pukul 23.00 WIB. <http://www.fas.org/sgp/news/2010/12/clearances.html>.
- Kelly, Jr., J. (2012). *WikiLeaks: A Guide for American Law Librarians*. Jurnal Law Library.
- Kohn, Stephen M. (2010). *A Sad Day For the US If the Espionage Act is Used Against WikiLeaks*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 01.10 WIB. <http://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/dec/15/wikileaks-us-espionage-act>.
- Lejeune, L. (2012). *WikiLeaks as a Media Platform: Legal Aspects*. Faculty Law of University Ghent: LLM of Advanced Studies in European Law.
- Maurer, Tim. (2011). “WikiLeaks 2010: A Glimpse of the Future?” *Discussion Paper 2011-10*, Cambridge, Mass.: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.
- Miller, Greg. (2010). *CIA Launches Task Force to Assess Impact of U.S. Cables’ Exposure by WikiLeaks*. Washington Post. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/21/AR2010122104599.html>
- Milne, Seumas. (2012). *Don’t Lose Sight of Why the US is Out to Get Julian Assange*.

- Diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 22.15 WIB. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/aug/21/why-us-is-out-to-get-assange>.
- National Counterintelligence and Security Center (NCSC). Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015, pukul 23.30 WIB. <http://www.ncsc.gov/nittf/>.
- Pangburn, DJ. (2012). *UNESCO Bans WikiLeaks from International Conference on WikiLeaks*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 17.29 WIB. <http://www.deathandtaxesmag.com/178756/unesco-bans-wikileaks-from-international-conference-on-wikileaks/>.
- Poulsen, Kevin. (2010). *Lieberman Introduces Anti-Wikileaks Legislation*. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 23.05 WIB. <http://www.wired.com/2010/12/shield/>.
- Savage, Charlie. (2010). *U.S Tries to Build Case for Conspiracy by WikiLeaks*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 01.23 WIB. [http://www.nytimes.com/2010/12/16/world/16wiki.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2010/12/16/world/16wiki.html?_r=0).
- Shane, Scott. (2011). *Ex-N.S.A. Aide Gains Plea Deal in Leak Case; Setback to U.S.* Diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 01.44 WIB. <http://www.nytimes.com/2011/06/10/us/10leak.html>.
- Spiegel, Der. (2011). *Staatsfeind WikiLeaks – Wie eine Gruppe von Netzaktivisten die mächtigsten Nationen der Welt herausfordert*.
- Steinmetz, Kevin F. (2012). “WikiLeaks and Realpolitik” *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology Vol. 4(1): 14-52*. Texas: College of Criminal Justice. Sam Houston State University.
- The Guardian – Leigh, David and Luke Harding. (2011). *WikiLeaks – Inside Julian Assange’s War on Secrecy*. Public Affairs: New York.
- The Guardian. (2016). *Julian Assange Hails ‘Sweet Victory’ of UN Report - As It Happened*. Diakses pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 15.00 WIB. <http://www.theguardian.com/media/live/2016/feb/05/julian-assange-is-being-arbitrarily-detained-un-panel-finds-live-updates>.
- The Wall Street Journal – Crovitz, L. Gordon. (2011). *WikiLeaks and the Espionage Act*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 02.07 WIB. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703387904576278883412892972>.
- Weiss, Baruch. (2010). *Why Prosecuting Wikileaks’ Julian Assange Won’t Be Easy*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 01.00 WIB. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/03/AR2010120303267.html>.
- Zittrain, Jonathan. (2010). *The Internet’s Fort Knox Problem*. Diakses pada tanggal 24 Maret 2016, pada pukul 00.39 WIB. <http://blogs.harvard.edu/futureoftheinternet/2010/06/03/fort-knox-problem/>.